

Respons Publik terhadap Isu Bendera *One Piece* di TikTok Menjelang HUT RI

Diani Assadiyah, Universitas Lampung
Correspondent Email: diahassadiyah@gmail.com

ABSTRACT

On the eve of the 80th Anniversary of the Republic of Indonesia, the hoisting of the One-Piece pirate flag (Jolly Roger) sparked a wide-ranging debate on social media, particularly TikTok. This popular culture symbol shifted from being merely a fictional icon to a symbolic political issue involving society, the media, and the government. This study aims to analyze public responses to TikTok content related to the One Piece flag within the framework of digital political communication. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observations of seven TikTok accounts discussing the issue, along with public interactions in the comment sections, supported by secondary sources from online media. The analysis refers to agenda-setting theory, digital political communication, and critical discourse analysis. The findings reveal that TikTok's algorithm and user participation play a significant role in shaping the public agenda. Netizens' responses reflect the tension between official nationalism and freedom of expression, while the One One Piece symbol is positioned as a space of ideological negotiation. These results highlight the role of social media as a dynamic arena of symbolic politics.

Keywords: *Digital political communication; agenda setting; critical discourse analysis.*

ABSTRAK

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera bajak laut *One Piece* (Jolly Roger) memicu perdebatan luas di media sosial, khususnya TikTok. Simbol budaya populer ini bergeser dari sekadar ikon fiksi menjadi isu politik simbolik yang melibatkan masyarakat, media, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon publik terhadap konten TikTok terkait bendera *One Piece* dalam kerangka komunikasi politik digital. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi tujuh akun TikTok yang membahas isu ini, serta interaksi publik di kolom komentar, diperkuat dengan sumber sekunder dari media daring. Analisis mengacu pada teori agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma TikTok dan partisipasi pengguna berperan penting dalam membentuk agenda publik. Respons warganet mencerminkan ketegangan antara nasionalisme resmi dan kebebasan berekspresi, sementara simbol *One Piece* diposisikan sebagai ruang negosiasi ideologis. Temuan ini menegaskan peran media sosial sebagai arena politik simbolik yang dinamis.

Kata Kunci: Komunikasi politik digital; agenda setting; analisis wacana kritis.



PENDAHULUAN

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, ruang publik Indonesia diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut *One Piece* (Jolly Roger), simbol fiksi dari kru “Straw Hat Pirates” dalam manga dan anime Jepang. Bendera ini terlihat dikibarkan di berbagai lokasi, mulai dari rumah warga, jalan raya, hingga kendaraan yang digunakan dalam konvoi. Beberapa video viral juga memperlihatkan bendera *One Piece* berkibar berdampingan dengan bendera Merah Putih, bahkan menjadi bagian dari arak-arakan komunitas menjelang perayaan kemerdekaan. (Oktarina et al., 2022).

Fenomena ini menjadi sorotan karena terjadi pada momentum nasional yang sakral, yakni peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran bendera fiksi di ruang publik menimbulkan pertanyaan tentang batas antara ekspresi budaya populer dengan penghormatan terhadap simbol negara. Di satu sisi, simbol *One Piece* dianggap sebagai bentuk kreativitas dan identitas generasi muda di media digital, tetapi di sisi lain, muncul permasalahan mengenai potensi pelemahan nilai nasionalisme dan penghormatan terhadap bendera Merah Putih. Permasalahan semakin kompleks ketika fenomena ini meluas di TikTok melalui ribuan unggahan yang viral dengan berbagai narasi, mulai dari hiburan hingga sindiran simbolik. Penyebaran cepat konten bendera *One Piece* mengindikasikan bagaimana budaya populer dapat bertransformasi menjadi isu publik yang sensitif, terutama ketika bersinggungan dengan simbol-simbol kenegaraan. Situasi ini membuka ruang perdebatan mengenai bagaimana masyarakat, media, dan pemerintah memaknai ekspresi budaya digital dalam konteks nasionalisme dan politik simbolik. Pada akhirnya, pertemuan antar media, budaya, dan politik dalam contoh-contoh seperti bendera *One Piece* berfungsi sebagai gambaran dalam lingkungan sosial yang cepat berubah (Ma'unah, 2020).

Fenomena ini menjadi contoh nyata dari komunikasi politik di ranah digital, dimana media sosial berfungsi sebagai arena untuk kontestasi simbol, narasi, dan pandangan. TikTok, yang dulunya lebih dikenal sebagai tempat bersenang-senang, sekarang mendukung pembentukan pandangan masyarakat dan penyebaran isu politik dengan cepat dan luas. Dalam konteks ini, teori agenda setting menjadi penting. Karena menunjukkan bagaimana media, baik media profesional maupun yang dikembangkan pengguna, memiliki pengaruh dalam menentukan isu mana yang dianggap signifikan dan layak untuk dibahas (Kusnadi & Annisa, 2023). Meski demikian, saat ini masih minim penelitian yang mendalam peran TikTok dalam mbingkai isu politik yang bersasal dari simbol budaya populer seperti bendera *One Piece*. Sebagaimana besar studi mengenai agenda setting masih berfokus pada media tradisional atau topik-topik resmi seperti pemilu dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, fenomena ini

menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam komunikasi politik digital dan simbol-simbol terkenal bisa menjadi pemicu perdebatan nasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana akun-akun TikTok menyusun narasi dan membingkai isu bendera *One Piece* menjelang HUT ke-80 RI, serta mengungkapkan bagaimana reaksi publik di platform tersebut mencerminkan dinamika komunikasi politik di kalangan generasi digital.

Penelitian ini tentang komunikasi politik di ranah digital terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan semakin banyaknya pemakaian media sosial sebagai tempat berdiskusi dan menciptakan makna politik. Konsep penetapan agenda yang diusulkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972 mengungkapkan bahwa media tidak hanya menginformasikan masyarakat mengenai isu-isu yang harus dipikirkan tetapi juga tentang bagaimana cara memikirkan isu-isu tersebut. Dalam hal ini, media digital seperti TikTok tidak sekedar berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan pesan, melainkan juga sebagai entitas yang secara aktif berperan dalam membentuk diskursus melalui interaksi pengguna dan mekanisme algoritma (Efendi et al., 2023).

Perubahan dalam media digital telah mengubah cara orang mendapatkan informasi dan terlibat dalam komunikasi politik. Riset yang dilakukan oleh Abdi Ihsan dkk (2025) di *Komunika: Jurnal Ilmiah Komunikasi* mengungkapkan bahwa digital, terutama melalui platform media sosial, mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi perilaku pemilih serta mendorong partisipasi politik yang lebih aktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konten politik yang viral di ranah digital dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan membentuk pandangan tentang kandidat atau masalah politik tertentu (Ihsan, 2025). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Olivia Rizka Vinanda dan rekan-rekannya (2025) dalam *JIC: Jurnal Intellect Insan Cendikia* mengungkapkan pentingnya media digital dalam pendekatan sosialisasi politik yang diterapkan oleh partai-partai. Mereka menemukan bahwa platform media sosial seperti TikTok dan Instagram digunakan sebagai sarana baru untuk menciptakan citra politik yang lebih dekat dan emosional, khususnya untuk menarik pemilih muda. Namun, riset ini juga menekankan bahwa konten yang bersifat populis dan dangkal, serta penyebaran informasi yang menyesatkan adalah tantangan signifikan dalam domain politik digital (Rizka Vinanda et al., 2025). Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini tidak berfokus pada kandidat, partai politik, atau perilaku pemilih, melainkan pada simbol budaya populer berupa bendera *One Piece* yang viral di TikTok menjelang HUT RI. Penelitian ini melihat bagaimana simbol non-politis dapat bertransformasi menjadi isu politik simbolik dan memicu diskursus publik. Dengan mengintegrasikan teori agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana

kritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa budaya populer juga dapat menjadi arena komunikasi politik, bukan hanya kampanye elektoral yang digerakkan oleh aktor formal.

Meskipun banyak penelitian tentang komunikasi politik digital dan fungsi media sosial dalam kampanye politik, masih sedikit yang secara khusus meneliti praktik penentuan agenda dalam isu-isu budaya populer, seperti simbol fiksi atau fandom, yang kemudian dipolitisasi dalam ruang digital menjelang peristiwa penting kenegaraan. Contohnya, tren penggunaan simbol bendera bajak laut dari *One Piece* yang viral TikTok saat peringatan HUT ke-80 RI, telah memicu diskusi luas di masyarakat, namun belum ditelaah secara ilmiah dalam kerangka komunikasi politik digital dan agenda media. Studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memusatkan perhatian pada cara akun TikTok membingkai dan membangun narasi seputar isu simbolik ini, serta bagaimana reaksi pemerintah dan masyarakat muncul sebagai hasil dari penyebaran narasi tersebut (Putri et al., 2025) tetapi Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data yang digunakan hanya bersumber dari konten TikTok dalam periode tertentu, yakni dua minggu sebelum perayaan HUT ke-80 RI. Hal ini membuat penelitian tidak sepenuhnya menangkap dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah momentum tersebut. Kedua, pemilihan akun dan konten dilakukan secara purposif sehingga tidak dapat merepresentasikan keseluruhan percakapan publik di media sosial yang lebih luas, termasuk di platform lain seperti Instagram, X (Twitter), atau Facebook. Ketiga, analisis respons publik hanya terbatas pada komentar yang muncul di unggahan TikTok, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan opini masyarakat secara keseluruhan di dunia nyata. Keempat, penelitian ini berfokus pada isu simbolik bendera *One Piece* sehingga tidak membandingkan dengan fenomena simbol budaya populer lain yang mungkin juga berpengaruh dalam ruang politik digital. Dengan mengintegrasikan teori penentuan agenda dan komunikasi politik digital, serta menganalisis konten yang viral dan respon netizen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun empiris dalam memahami interaksi antara budaya populer, media sosial, dan opini publik dalam konteks politik Indonesia saat ini.

Penelitian ini menghadirkan inovasi yang signifikan dari segi teori maupun praktik. Dari sudut pandang teoritis, studi ini memperluas penerapan teori agenda setting ke dalam dunia media sosial yang berfokus pada visual, seperti TikTok, terutama dalam konteks yang melibatkan simbol budaya pop, yaitu bendera bajak laut *One Piece*. Berbeda dengan kajian sebelumnya, riset yang dilakukan oleh Abdi Ihsan dkk (2025) menunjukkan bagaimana media digital memengaruhi perilaku pemilih serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Fokus penelitian ini jelas berada pada konteks elektoral, yaitu bagaimana konten politik yang viral di

media sosial dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap kandidat atau isu pemilu tertentu (Ihsan, 2025). Begitu pula penelitian Olivia Rizka Vinanda dkk (2025) yang menyoroti peran media sosial seperti TikTok dan Instagram dalam strategi sosialisasi politik partai. Studi tersebut membahas bagaimana partai memanfaatkan platform digital untuk membangun citra emosional dan menarik simpati pemilih muda. berfokus pada media tradisional dan isu-isu resmi seperti pemilihan umum, penelitian memicu reaksi politik serta membentuk diskursus publik dengan cara yang alami (Rizka Vinanda et al., 2025). Sehingga Penelitian ini mengintegrasikan teori agenda setting, kerangka komunikasi politik media, dan analisis wacana kritis untuk menelaah fenomena non-politis berupa bendera *One Piece* yang viral di TikTok menjelang HUT RI. Teori agenda setting digunakan untuk menjelaskan bagaimana algoritma TikTok dan interaksi pengguna dapat mengangkat isu ini ke dalam agenda publik. Teori kerangka komunikasi politik media (media framing) dipakai untuk memahami bagaimana simbol *One Piece* dibingkai oleh kreator konten baik sebagai humor, kritik, maupun simbol perlawanan sehingga memengaruhi cara publik memandang isu tersebut. Sementara itu, analisis wacana kritis memberikan kedalaman analisis terhadap makna ideologis dan relasi kuasa yang tercermin dalam respons warganet. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan teori komunikasi politik media dari isu-isu formal menuju fenomena budaya populer yang dipolitisasi di ruang digital.

Isu pengibaran bendera bajak laut *One Piece* yang ramai diperbincangkan di TikTok menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia telah mengundang reaksi yang luas dari masyarakat dan pihak berwenang. Walaupun berasal dari simbol fiktif dalam budaya populer, peristiwa ini menimbulkan diskusi yang mendalam di dunia maya, dimulai dari pandangan bahwa itu merupakan tindakan yang melukai semangat nasionalisme. Fenomena ini mengindikasikan bahwa simbol-simbol dalam budaya populer kini tidak hanya menjadi elemen hiburan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi bagian dari diskursus politik masa kini di platform media sosial (Adila & Eddyono, 2025). Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana berbagai akun TikTok mengemas isu pengibaran bendera bajak laut *One Piece* dan bagaimana publik bereaksi terhadap narasi tersebut dalam konteks komunikasi politik digital menjelang peristiwa kenegaraan. Masalah ini penting untuk dianalisis karena penelitian tentang konflik simbolik yang berasal dari budaya pop dalam konteks teori komunikasi politik khususnya di Indonesia, masih sangat terbatas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis respon publik terhadap isu bendera bajak laut *One Piece* yang disajikan dalam konten TikTok terhadap narasi yang mengandung makna simbolik dalam kerangka komunikasi politik digital menjelang perayaan HUT ke-80

Republik Indonesia. Fenomena pengibaran bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT RI penting diteliti karena menghadirkan relevansi akademis maupun praktis. Secara akademis, fenomena ini memperluas cakupan kajian komunikasi politik digital yang selama ini lebih banyak berfokus pada isu formal seperti pemilu, partai, atau kebijakan pemerintah, dengan menunjukkan bahwa simbol budaya populer juga dapat bertransformasi menjadi isu politik simbolik. Hal ini memungkinkan penerapan teori agenda setting, komunikasi politik media, dan analisis wacana kritis dalam konteks baru yang melibatkan interaksi budaya populer, media sosial, dan politik. Secara praktis, fenomena ini menunjukkan tantangan dalam mengelola ruang digital ketika ekspresi budaya generasi muda bersinggungan dengan simbol kenegaraan. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu merespons dengan pendekatan komunikasi dan literasi digital yang adaptif, sementara bagi masyarakat, fenomena ini menjadi cermin bahwa media sosial bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga arena politik simbolik yang mampu memengaruhi opini publik.

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka konseptual utama, yaitu agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana kritis, untuk memahami respons publik terhadap isu bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT Republik Indonesia.

Pertama, teori agenda setting menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana isu bendera *One Piece* yang awalnya muncul sebagai fenomena budaya populer dapat berkembang menjadi perbincangan luas di ruang publik digital. Teori yang dikemukakan McCombs dan Shaw (1972) menunjukkan bahwa media tidak hanya memberi tahu masyarakat tentang isu yang perlu diperhatikan, tetapi juga menentukan isu apa yang dianggap penting. Dalam konteks ini, TikTok berperan sebagai medium baru yang menggeser logika agenda setting dari dominasi media arus utama menuju ruang digital berbasis algoritma. Viralitas, interaksi, serta penggunaan hashtag memungkinkan isu bendera *One Piece* menempati posisi penting dalam percakapan publik menjelang HUT RI. Dengan demikian, agenda setting membantu penelitian ini untuk melihat bagaimana fenomena budaya populer dapat berubah menjadi isu politik nasional (Ritonga, 2018). Adapun isu mengenai bendera *One Piece* yang terlihat di beberapa lokasi di Indonesia bukan Cuma fenomena budaya yang sedang ramai melainkan berfungsi sebagai titik pertemuan antara ekspresi penggemar, nasionalisme dalam ranah digital, serta sensitivitas politik mendekati perayaan hari besar nasional. TikTok sebagai platform modern mempercepat penyebaran informasi, menciptakan ruang untuk berdiskusi, serta mendorong terbentuknya opini di masyarakat (Suhendra & Selly Pratiwi, 2024).

Kedua, kerangka komunikasi politik digital dipakai untuk menganalisis bagaimana TikTok menjadi arena produksi dan distribusi narasi politik. Media sosial yang semula dipandang sebagai ruang hiburan kini berfungsi sebagai wadah artikulasi politik yang cair, di mana kreator konten dan audiens saling berinteraksi membentuk makna. Dalam kasus bendera *One Piece*, kreator menggunakan simbol budaya populer tersebut untuk menyampaikan pesan politik yang beragam, mulai dari kritik terhadap pemerintah hingga ekspresi kebebasan individu. Algoritma TikTok yang mempercepat penyebaran konten berkontribusi pada terciptanya ruang deliberasi digital yang dinamis. Melalui kerangka ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana media sosial visual berfungsi tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai tempat komunikasi politik yang efektif di kalangan generasi muda (Nofiard, 2022).

Ketiga, analisis wacana kritis digunakan sebagai pisau analisis untuk menggali makna ideologis dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik respons publik. Pendekatan Norman Fairclough (1995) melihat wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada level teks, analisis berfokus pada bagaimana bendera *One Piece* ditampilkan dalam konten TikTok, misalnya dipadukan dengan bendera merah putih atau dijadikan simbol perlawanan. Pada level praktik diskursif, penelitian menelaah bagaimana interaksi di kolom komentar dalam membentuk narasi tertentu mengenai nasionalisme dan kebebasan berekspresi. Sedangkan pada level praktik sosial, analisis diarahkan pada bagaimana perdebatan simbolik ini mencerminkan relasi kuasa antara masyarakat digital dan aparat negara, termasuk ekspresi resistensi terhadap otoritas (Munfarida, 2014).

Melalui integrasi ketiga kerangka ini, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena viral, tetapi juga berupaya menjelaskan proses terbentuknya agenda publik, menguraikan dinamika komunikasi politik digital, serta menganalisis kontestasi ideologis yang muncul dari respons publik. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa media sosial seperti TikTok kini berfungsi sebagai arena di mana budaya populer, politik, dan identitas nasional saling bertemu, bernegosiasi, dan diperdebatkan secara terbuka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendetail fenomena sosial berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan tanpa melakukan perubahan variabel atau pengujian hipotesis (Koyan, 2022). Pendekatan ini dipilih karena topik yang diteliti yakni proses penyusunan agenda, reaksi masyarakat, dan kontruksi digital mengenai bendera *One Piece* di

TikTok butuh pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian dapat menggambarkan realitas yang muncul di dunia digital, memperhatikan detail interaksi, serta menggali makna yang tersembunyi di balik simbol dan narasi publik (Hafsiah Yakin, 2023). Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan pengamatan dan mendokumentasikan konten TikTok yang secara langsung membahas atau menampilkan bendera *One Piece* dalam periode dua minggu sebelum perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemilihan konten dilakukan dengan cara purposif, yakni hanya mencakup unggahan yang memenuhi kriteria relevansi isu, keterhubungan dengan simbol bendera *One Piece*, serta memiliki interaksi yang cukup tinggi untuk merepresentasikan perhatian publik. Dari hasil seleksi, terdapat Tujuh akun TikTok yang dijadikan sumber utama karena secara konsisten menampilkan, menafsirkan, dan memicu diskusi publik terkait isu ini, yaitu: @Dj Donny, @Arisvara Real Account, @Abigail Limuria, @Tribun News, @Danangsutawijaya, @marr dan @Cerita. Id. Data yang berhasil dikumpulkan meliputi video, deksripsi postingan, komentar dari pengguna, jumlah interaksi, serta penggunaan tagar. Selain itu, data sekunder berupa berita daring, postingan di platform media sosial lainnya, dan dokumentasi visual digunakan untuk memperkuat pemahaman konteks (Rijali, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada tiga kerangka teori, yaitu agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana kritis. Proses analisis dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga memungkinkan penyesuaian fokus berdasarkan temuan lapangan.

Langkah pertama adalah identifikasi isu dan kategorisasi konten, yaitu mengumpulkan video TikTok yang menampilkan bendera *One Piece* dalam periode dua minggu menjelang HUT RI ke-80, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan frekuensi tayangan, penggunaan hashtag, serta tingkat interaksi (like, komentar, share). Proses ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana isu bendera *One Piece* mendapatkan perhatian luas dan menjadi bagian dari agenda publik melalui logika viralitas TikTok, sesuai dengan kerangka agenda setting. Langkah kedua adalah analisis narasi dan framing konten, yakni menelaah bagaimana kreator akun TikTok seperti @DJ Donny, @Arisvara Real Account, @Abigail Limuria, @Tribunnews, dan @Danangsutawijaya membingkai simbol bendera *One Piece* dalam unggahannya. Narasi yang muncul dikaji untuk melihat peran komunikasi politik digital, misalnya bagaimana kreator mengaitkan simbol budaya populer dengan isu nasionalisme, kebebasan berekspresi, atau kritik terhadap pemerintah. Langkah ketiga adalah analisis respons publik, yaitu meneliti komentar warganet yang muncul sebagai respons atas fenomena ini. Proses ini tidak hanya mengidentifikasi dukungan, kritik, atau parodi, tetapi juga menafsirkan bagaimana interaksi

digital membentuk ruang deliberasi politik di TikTok. Langkah keempat adalah analisis wacana kritis (AWK) berdasarkan model Norman Fairclough, dengan tiga tahapan: (1) analisis teks, untuk melihat pilihan kata, simbol visual, dan penggunaan metafora dalam konten maupun komentar; (2) analisis praktik diskursif, untuk mengungkap bagaimana konten diproduksi, disebar, dan diinterpretasikan ulang oleh publik; serta (3) analisis praktik sosial, untuk memahami bagaimana wacana ini mencerminkan relasi kuasa antara masyarakat digital dan aparat negara. Tahapan ini memungkinkan penelitian menemukan makna ideologis yang tersembunyi, termasuk konstruksi nasionalisme dan bentuk perlawanan yang muncul di ruang digital (Silaswati, M.Pd., 2019).

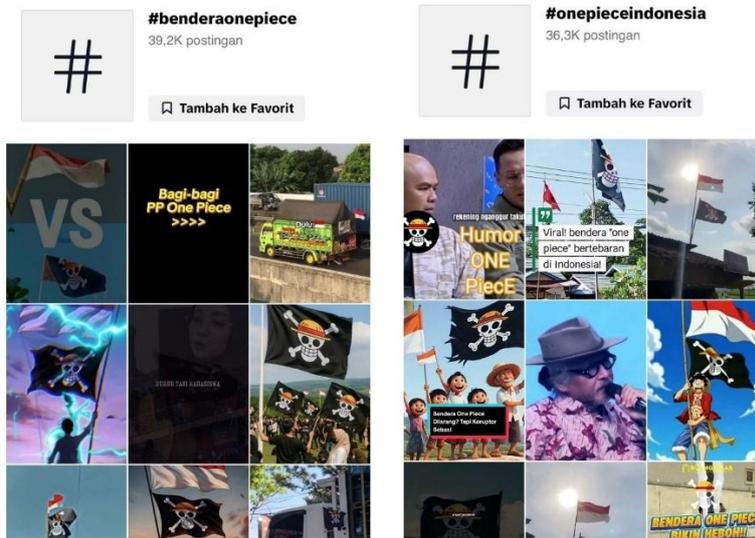
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada dinamika munculnya isu pengibaran bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia serta bagaimana publik meresponsnya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana simbol budaya populer dapat bertransformasi menjadi isu politik simbolik ketika memasuki ruang publik digital. Uraian dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana isu tersebut memperoleh perhatian melalui mekanisme algoritma TikTok dan partisipasi pengguna, bagaimana kreator konten membingkai narasi yang beragam, serta bagaimana warganet memberikan respons dalam bentuk dukungan, kritik, maupun sindiran. Selain itu, analisis wacana kritis digunakan untuk menggali makna ideologis dan relasi kuasa yang terkandung dalam diskursus publik seputar bendera *One Piece*. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menjelaskan proses viralitas isu di media sosial, tetapi juga membuka pertemuan antara budaya populer, nasionalisme, dan komunikasi politik digital yang membentuk wacana publik kontemporer di Indonesia. Untuk memudahkan alur analisis, pembahasan disusun ke dalam beberapa sub-bagian, yaitu: (1) Makna Simbol Bendera *One Piece* dalam Konteks Budaya Populer, yang mencakup Makna Naratif dan Nilai yang Dipresentasikan serta Identitas Kelompok dan Komunitas Fandom (2) Kontestasi Makna Simbol Menjelang HUT RI, yang mencakup Pertemuan Narasi Nasionalisme Resmi dan Budaya Populer serta Kritik Sosial dan Soft Protest dan (3) Peran Algoritma TikTok dalam Penyebaran Simbol, yang mencakup Logika Distribusi Algoritma dan Engagement serta Strategi Visual dalam Menarik Perhatian Publik Digital.

Dalam era media sosial yang sangat visual dan interaktif seperti TikTok, agenda politik tidak hanya ditentukan oleh media, tetapi juga oleh pengguna biasa yang menciptakan dan menyebarkan narasi melalui simbol-simbol yang mereka interpretasikan sendiri. Oleh sebab itu, pendekatan pengaturan agenda harus diperluas untuk menangkap perubahan dinamika ini,

termasuk bagaimana simbol-simbol populer bisa mendapatkan makna politik dan menimbulkan reaksi dari pihak berwenang (Tanudjaja, 2009). TikTok, dalam hal ini, berperan tidak hanya sebagai saluran hiburan, melainkan juga sebagai ruang diskusi di mana negosiasi tentang makna kebangsaan dan ekspresi politik berlangsung secara terbuka dan viral.

Gambar 1. Hastag yang digunakan di TikTok terkait isu bendera *One Piece* di Indonesia



Sumber: Platform Tiktok diakses pada tanggal 11 Agustus 2025. <https://vt.tiktok.com/ZSHs48wLuAUf7-Ga7xq/>

Pada gambar 1 merupakan hastag yang sedang ramai digunakan di platform TikTok yakni tentang vidio pendek yang menunjukkan bendera dengan gambar tengkorak khas tim bajak laut “*Straw Hat Pirates*” berkibar. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan intensitas perbincangan di media sosial mengenai fenomena penggunaan bendera *One Piece* di ruang publik Indonesia, terlihat dari ribuan unggahan dan variasi konten yang mencakup humor, dukungan, hingga kritik sosial. Fenomena ini mencerminkan pola klasik dalam siklus isu di media sosial, dimana satu konten pemicu menghasilkan gelombang reproduksi dan modifikasi yang dilakukan oleh pengguna lainnya.

Dalam sudut pandang agenda setting, hasil penelitian ini mengindikasi bahwa proses menentukan isu yang dianggap penting sudah tidak sepenuhnya berada di tangan media. TikTok dengan sistem algoritmanya, membawa isu ini ke halaman *For Your Fage* (FYP) bagi jutaan pengguna, sehingga menciptakan persepsi bahwa bendera *One Piece* adalah pembicaraan hangat menjelang perayaan HUT RI. Agenda publik terbentuk bukan melalui penyuntingan berita, melainkan dari kumpulan interaksi dan partisipasi audiens. Pelaku yang berperan dalam menyebarkan isu ini bervariasi, mulai dari akun pribadi dengan sedikit pengikut hingga influencer. Jika ditinjau dari teori agenda setting yang dikemukakan McCombs dan Shaw (1972), fenomena ini menggambarkan bagaimana isu yang awalnya

bersifat sederhana dapat berkembang menjadi pembahasan publik berskala nasional. Teori agenda setting menekankan bahwa media tidak hanya memberi tahu masyarakat tentang isu apa yang penting, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut. Dalam konteks ini, TikTok berfungsi sebagai aktor media baru yang menggantikan dominasi media arus utama. Melalui algoritma yang menempatkan konten di halaman *For Your Page* (FYP), TikTok secara tidak langsung menentukan isu yang layak diperbincangkan, sehingga simbol fiksi seperti bendera *One Piece* dapat dipersepsikan sebagai isu aktual menjelang HUT RI. Peran agenda setting di TikTok berbeda dari mekanisme klasik media massa. Jika sebelumnya redaksi dan jurnalis menentukan isu prioritas, kini logika algoritma dan partisipasi audiens menjadi faktor utama. Jumlah *like*, komentar, penggunaan hastag, hingga pola interaksi antar pengguna mendorong sebuah konten memperoleh visibilitas lebih luas. Dengan demikian, agenda publik tidak dibentuk oleh satu arah komunikasi dari media ke masyarakat, melainkan melalui interaksi timbal balik antara kreator konten, audiens, dan sistem algoritma. Proses ini menjadikan isu bendera *One Piece* bukan hanya viral, tetapi juga diposisikan sebagai percakapan penting dalam ruang digital, bahkan sebelum media arus utama menyorotinya.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam era digital, agenda setting tidak lagi bersifat top-down sebagaimana pada media konvensional, tetapi bergerak ke arah distributed agenda setting yang dipengaruhi oleh logika algoritma dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, bendera *One Piece* menjadi isu politik simbolik bukan karena diputuskan oleh media resmi, melainkan karena keterlibatan kolektif pengguna TikTok yang mereproduksi makna dan memperkuat posisinya sebagai topik hangat dalam percakapan publik.

Gambar 2. perspektif warganet di TikTok terkait isu bendera *One Piece*

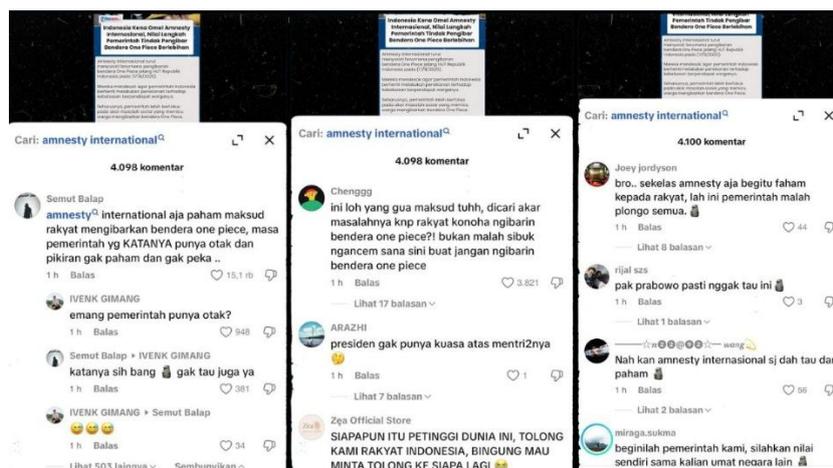


Sumber: Platform TikTok, 2025 diakses <https://vt.tiktok.com/ZSHs42ectbd4k-9EDVM/>,
<https://vt.tiktok.com/ZSHs428v9kQcN-OTHAB/>,<https://vt.tiktok.com/ZSHs4287jeQkx-TJ2pn/>.

Berdasarkan pengumpulan informasi melalui eksplorasi isi TikTok, di temukan pada gambar 2. Bahwa isu bendera *One Piece* menjadi tema yang banyak dibicarakan di antara pengguna internet, tidak hanya aspek hiburan, tetapi juga terkait dengan topik politik, nasionalisme, dan kebebasan berekspresi.

Pertama, dalam vidio yang diunggah oleh kreator @DJ Donny, tampak bahwa fenomena ini menarik perhatian media sosial. Judul berita “Bendera One Piece Viral, ketua MPR percaya rakyat tetap cinta merah putih” mencerminkan respons dari lembaga pemerintah yang menegaskan keyakinan terhadap semangat nasionalisme masyarakat, walaupun ada tren pengibaran bendera fiksi ini. Penekanan pada kata “Rakyat” dalam vidio tersebut menunjukkan usaha untuk menekankan bahwa fenomena ini tidak mengurangi rasa cinta terhadap tanah air. Kedua, dalam vidio @Arisvara Real Account, pembuat konten menghubungkan fenomena bendera *One Piece* dengan cerita sejarah serta hak untuk berekspresi. Klip dari Presiden ke 04 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) digunakan sebagai perbandingan berkaitan dengan sikap toleran terhadap simbol-simbol tertentu. Pendekatan ini menggambarkan upaya untuk mengubah pembicaraan dari sekedar isu hiburan menjadi elemen dari diskusi tentang simbolik di ruang publik. Ketiga, vidio yang diunggah oleh @Abigail Limuria menunjukkan penggabungan antara simbol bendera *One Piece* dan bendera merah putih. Menariknya, narasi yang disampaikan dalam bahasa Inggris oleh kreator asal Indonesia. Pemilihan bahasa ini menunjukkan adanya upaya memperluas jangkauan audiens, tidak hanya kepada warganet dalam negeri tetapi juga ke komunitas internasional di platform TikTok. Hal ini menandakan bahwa isu bendera *One Piece* telah melampaui konteks lokal dan diproyeksikan sebagai fenomena yang relevan di tingkat global. Penggunaan musik tema *One Piece* semakin memperkuat keterkaitan konten dengan budaya populer jepang, sekaligus menghadirkan kesan kreatif dan inklusif.

Gambar 3. Komentar netizen pada akun TikTok Tribunnews



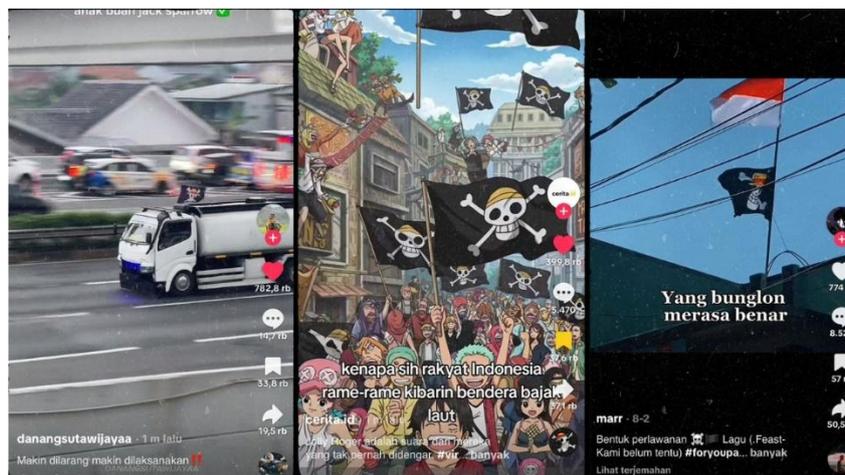
Sumber: Akun TikTok Tribunnews, 2025. Diakses <https://vt.tiktok.com/ZSHsqjGJN8p6j-CHMUL/>.

Analisis terhadap tangkapan layar komentar di unggahan Tiktok oleh Tribunnews yang menjelaskan Amnesty Internasional turut menyoroti fenomena pengibaran bendera *One Piece* jelang Hut Republik Indonesia (Tribunnews.com, 2025). Komentar-komentar pada gambar 3 menunjukkan berbagai sudut pandang yang mencerminkan dinamika diskusi publik di platform media sosial.

Pertama beberapa pengguna internet menilai bahwa fenomena ini bukanlah masalah yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Contohnya, ada komentar yang menyebutkan bahwa Amnesty Internasional lebih memahami konteks pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk ekspresi masyarakat, sementara pemerintah dianggap tidak peka terhadap hal ini. Kritik semacam ini sering disampaikan dengan nada sindiran, seperti mempertanyakan apakah pemerintah atau pejabat memiliki “otak” atau “kuasa” untuk menangani isu-isu yang lebih penting. Kedua, terdapat tanggapan yang menyoroti pentingnya menemukan penyebab mendasar mengapa masyarakat mengibarkan bendera yang tidak asli itu, dari pada hanya melarangnya. Pandangan ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk memandangi isu ini dari aspek sosial dan budaya, bukan hanya dari sudut pandang penegakan hukum. Ketiga, beberapa tanggapan berisi sindiran terhadap tokoh atau lembaga tertentu, seperti menyebut Presiden atau Menteri yang dinilai tidak paham atau tidak menangani masalah ini, serta mengejek tokoh politik seperti Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini juga menjadi sarana bagi sebagian masyarakat untuk menyampaikan kritik politik yang lebih luas. Keempat, meskipun ada kritik, ada juga beberapa orang yang beranggapan bahwa aparat memiliki hak untuk melakukan penerbitan karena dianggap fenomena ini sebagai pelanggaran simbolik yang dapat mengurangi kehormatan bendera negara. Namun, jumlah tanggapan yang bersifat demikian jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang bernada kritik dan sindiran.

Dalam keseluruhan analisis, temuan ini menegaskan bahwa kolom komentar di media sosial bukan hanya menjadi wajah untuk mengungkapkan dukungan atau penolakan terhadap suatu isu, tetapi juga merupakan arena untuk menyampaikan kritik politik, menilai kebijakan publik, dan mengekspresikan identitas kelompok. Dalam konteks fenomena bendera *One Piece*, diskursus yang berkembang tidak lepas dari ketegangan antara nilai-nilai nasionalisme, kebebasan berekspresi, serta dinamika politik di ranah digital. Pendekatan digital dalam komunikasi politik ini memungkinkan kita untuk memahami dinamika sebagai sebuah partisipasi politik yang bersifat tidak langsung. Meskipun banyak isi yang disajikan dalam bentuk humor atau ironi, pesan-pesan politik masih dapat diterima melalui simbol, cerita, dan pilihan kata yang dipilih oleh pengguna TikTok. Diskusi tentang bendera *One Piece* membuka jalan untuk pembicaraan yang lebih luas mengenai nasionalisme, kebebasan mengekspresikan diri, serta hubungan antara negara dan warganya di dunia digital (Nuraliza et al., 2024).

Gambar 4. Bendera *One Piece* yang dikibarkan di Indonesia



Sumber: Tiktok, 2025, diambil dari <https://vt.tiktok.com/ZSHsqfD3rFLDy-Li2xu/>, <https://vt.tiktok.com/ZSHsqfPrfHyxm-ucFDL/>, <https://vt.tiktok.com/ZSHsqfy4eDEfw-QQGR/>.

Hasil analisis wacana kritis menunjukkan bahwa simbol bendera *One Piece* mendapatkan perubahan dalam percakapan publik di ruang digital. Dalam ranah budaya, bendera itu melambangkan petualangan, persahabatan, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Ketika makna ini muncul di ruang publik menjelang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, ia bertemu dengan narasi nasionalisme resmi yang terhubung dengan bendera Merah Putih. Pertemuan dari kedua makna ini menciptakan ruang untuk pertikaian simbolis: bagi sebagian pengguna, bendera *One Piece* menjadi lambang perlawanan terhadap rigiditas birokrasi, sementara bagi yang lain, simbol ini dianggap sebagai ancaman bagi keselarasan bendera negara.

Gambar di atas memperlihatkan tiga cuplikan video TikTok yang mempresentasikan keragaman cara publik mengartikulasikan keragaman cara publik mengartikulasikan makna bendera *One Piece*, pada video pertama yang diunggah oleh danangsutawijaya memperlihatkan sebuah truk yang melintas di jalan raya sambil mengibarkan bendera *One Piece*. Keterangan video bertuliskan “*makin dilarang makin dilaksanakan*” yang mencerminkan bentuk perlawanan simbolik terhadap larangan yang diberlakukan oleh aparat. Video kedua yang diunggah oleh cerita.id menggunakan ilustrasi anime yang menampilkan kerumunan karakter mengibarkan bendera bajak laut, disertai teks, “*kenapa sih rakyat Indoneisa rame-rame kibarin bendera bajak laut*”. Konten ini memosisikan fenomena tersebut sebagai tren kolektif yang melibatkan rasa kebersamaan di antara warganet. Dan video yang diunggah oleh marr menampilkan bendera *One Piece* berkibar bersama bendera Merah Putih, dengan teks “*yang bunglon merasa benar*”. Narasi ini sarat makna sindirian, mengaitkan fenomena simbolik dengan kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap oportunis atau memonopoli kebenaran.

Kombinasi gambar dan cerita ini menunjukkan bagaimana platform media sosial, terutama TikTok, berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan makna yang menggabungkan dua simbol, bendera fiksi dan bendera negara. Dalam ruang diskusi yang penuh dengan negosiasi, perlawanan, dan penafsiran ulang. Kejadian ini menegaskan bahwa budaya populer bisa menjadi saluran kritik terhadap politik yang ampuh saat dihubungkan dengan konteks simbolik negara.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik bahwa pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memberikan kesempatan untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh, dari munculnya isu di TikTok, cara reproduksi dan distribusinya melalui interaksi antar pengguna, hingga terbentuknya wacana yang menggabungkan unsur hiburan, politik, dan ideologi. Dengan demikian, temuan ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai cara isu *bendera One Piece* mendapatkan perhatian, bagaimana publik meresponsnya, dan bagaimana makna ideologisnya dibentuk serta dipertentangkan di tengah momentum percayaan kemerdekaan.

Makna Simbol Bendera *One Piece* Dalam Konteks Budaya Populer

Makna Naratif dan Nilai Yang Dipresentasikan

Bendera *One Piece* yang dikenal dengan sebutan Jolly Roger dari kru Topi Jerami, secara kultural menyimbolkan nilai-nilai petualangan, persahabatan dan penolakan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak adil. Dalam cerita aslinya, simbol ini berfungsi tidak hanya sebagai identitas untuk kelompok bajak laut, tetapi juga sebagai wujud dari kebebasan dan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian (Restu & Sulaiman, 2025). Nilai-nilai ini sangat

resonan dengan generasi muda yang akrab dengan budaya populer Jepang, terutama melalui anime dan manga. Dalam konteks digital, simbol ini mengalami pergeseran makna: dari sekedar fiksi menjadi ikon identitas kolektif yang bisa digunakan untuk menyuarakan harapan atau sikap tertentu di ruang maya.

Identitas Kelompok dan Komunitas Fandom

Penerapan bendera *One Piece* di TikTok juga terkait erat dengan identitas komunitas penggemar yang kuat dan saling terhubung melalui referensi bersama. Untuk para penggemar, bendera ini menjadi simbol keanggotaan tidak resmi, sekaligus cara menunjukkan dukungan terhadap cerita yang mengedepankan kebebasan berekspresi (Kholis, 2022). Alasan mengapa simbol ini diangkat menjelang perayaan HUT RI adalah karena daya tariknya yang luas di kalangan generasi muda, kemampuannya membangkitkan rasa kebersamaan, serta kemungkinannya untuk diinterpretasikan dengan fleksibel sehingga dapat dipahami baik sebagai representasi budaya populer maupun sebagai bentuk sindirian atau kritik sosial.

Kontestasi Makna Simbol Menjelang HUT RI

Pertemuan Narasi Nasionalisme Resmi dan Budaya Populer

Saat simbol bendera *One Piece* muncul menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia memasuki arena persaingan makna. Di satu sisi, terdapat narasi nasionalisme resmi yang menekankan kesakralan bendera merah-putih sebagai simbol negara. Di sisi lain, simbol budaya populer seperti *One Piece* membawa semangat yang lebih fleksibel, kreatif, dan terkadang menentang norma. Pertemuan kedua narasi ini memicu diskusi di media sosial, sebagian menanggapnya sebagai wujud kreativitas generasi muda yang valid, sementara yang lainnya melihatnya sebagai tanda kurangnya penghormatan terhadap lambang negara.

Kritik Sosial dan Soft Protest

Bagi beberapa pembuatan konten dan pengguna TikTok, pemakaian bendera *One Piece* dalam konteks ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga sebagai bentuk kritik sosial yang disampaikan dengan halus. Nilai kebebasan, keberanian, dan perlawanan terhadap otoritas yang terdapat dalam narasi *One Piece* digunakan untuk menyampaikan pesan bahwa patriotisme tidak selalu harus terlihat dalam bentuk antara ekspresi pribadi dan tuntutan kolektif untuk menghormati simbol nasional.

Peran Algoritma TikTok Dalam Penyebaran Simbol

Logika distribusi Algoritma dan Engagement

TikTok, dengan sistem rekomendasi yang berorientasi pada interaksi pengguna, memiliki dampak penting dalam meningkatkan jangkauan konten yang berkaitan dengan simbol bendera *One Piece*. Video yang menggabungkan elemen budaya populer dan momen-momen nasional biasanya menarik perhatian yang besar, berkat keunikan dan kemampuan mereka untuk membangkitkan rasa ingin tahu.

Strategi Visual Dalam Menarik Perhatian Publik Digital

Para kreator di TikTok memanfaatkan tampilan yang berbeda antara bendera *One Piece* dan konteks nasional untuk merangsang interaksi dari pengguna. Pendekatan ini tidak hanya membuat konten lebih mungkin viral, tetapi juga memicu percakapan di kolom komentar, yang pada gilirannya memperkuat fungsi penetapan agenda dari simbol tersebut mengangkat topik yang semula hanya dikenal oleh komunitas penggemar menjadi isu yang dibicarakan secara luas di level nasional.

KESIMPULAN

Fenomena pengibaran bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia bukan sekadar ekspresi budaya populer, melainkan telah berkembang menjadi isu politik simbolik yang memicu diskursus publik. Kehadiran simbol fiksi di ruang publik digital menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kreativitas generasi muda dengan penghormatan terhadap simbol negara. Minimnya penelitian terdahulu yang mengkaji bagaimana budaya populer dipolitisasi di ruang digital menegaskan pentingnya penelitian ini. Dengan mengintegrasikan teori agenda setting, kerangka komunikasi politik media, dan analisis wacana kritis, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana isu bendera *One Piece* dibingkai, disebar, dan direspons oleh publik, sekaligus menegaskan urgensi akademis maupun praktis dalam memahami komunikasi politik kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data dan fokus isu, sehingga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas analisis. Pertama, eksplorasi terhadap isu simbolik lain dari budaya populer seperti atribut anime, musik, atau ikon digital dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana simbol-simbol non-politik bertransformasi menjadi isu politik dalam ruang digital. Kedua, penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antar-platform, misalnya antara TikTok, Instagram, X (Twitter), dan YouTube, untuk melihat perbedaan logika algoritma, pola interaksi, serta framing isu simbolik

yang berkembang di masing-masing media. Ketiga, pendekatan kuantitatif dengan analisis big data atau survei opini publik juga dapat melengkapi temuan kualitatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika komunikasi politik digital. Dengan arah tersebut, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkaya literatur komunikasi politik sekaligus memberi kontribusi praktis bagi pengelolaan isu-isu simbolik di ruang publik digital.

REFERENSI

- Adila, I., & Eddyono, A. S. (2025). *Trajektori Branding Politik di Indonesia : dari Kampanye Konvensional ke Politik Performatif di Media Sosial*. 7(1), 18–39.
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori Agenda Setting. *Junral Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Hafsiah Yakin, I. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), 1–7. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Ihsan, A. (2025). Dampak Media Digital terhadap Komunikasi Politik. *Komunika : Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2(3), 20–28. <https://doi.org/10.70437/komunika.v2i3.1043>
- Kholis, N. (2022). Mitoni dalam Perspektif pendidikan Agama Islam. *Islamidia*, 1(2), 118.
- Koyan, P. D. I. W. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasini* (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Kusnadi, E., & Annisa, R. N. (2023). Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Pembentukan Kesadaran Politik Peserta Didik Dalam Berkewarganegaraan. *Academy of Education Journal*, 14(2), 410–422. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1702>
- Ma'unah, L. (2020). *Pembentukan Opini Publik Tentang Isu Jokowi Seorang Komunis*. 1–11.
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>
- Nuraliza, V., Andhi Nur Rahmadi, Alvan Mubaroq, Kristiyono Kristiyono, Alisyia Putri Melani, & Anila Ifana. (2024). Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 245–261. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2514>
- Oktarina, O., Sarmiati, S., & Asrinaldi, A. (2022). Globalisasi dan identitas budaya Indonesia melalui aplikasi tiktok. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 277.

<https://doi.org/10.29210/30031775000>

- Putri, N. N., Khoirunnisa, D. A., Ilhamy, D. W., Ikhsan, M., & Purwanto, E. (2025). Pergeseran Budaya: Media Baru sebagai Tiktok dan Aparatus Ideologi. *CONVERSE Journal Communication Science*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.47134/converse.v2i1.4345>
- Restu, P., & Sulaiman, M. (2025). *Fenomena Maraknya Pengibaran Bendera One Piece Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025 : Kajian Budaya Pop dan Nasionalisme*. 1(4), 77–80.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Rizka Vinanda, O., Rido Saputra, A., Istiqomah, B. A., Ramadhan, L. R., & Asiffa, M. (2025). *FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SOSIALISASI POLITIK DI ERA DIGITAL THE FUNCTION OF POLITICAL PARTIES IN POLITICAL SOCIALIZATION IN THE DIGITAL ERA* *Hukum Tata Negara|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 10303–10311. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Silaswati, M.Pd., D. D. (2019). Analisis Wacana Kritis Dalam Pengkajian Wacana. *METAMORFOSIS | Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.55222/metamorfosis.v12i1.124>
- Suhendra, S., & Selly Pratiwi, F. (2024). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Tanudjaja, B. B. (2009). Pengaruh Media Komunikasi Massa Terhadap Popular Culture Dalam Kajian Budaya/Cultural Studies. *Nirmana*, 9(2), 96–105.
- Tribunnews.com. (2025). *Indonesia kena omel Amnesty Internasional, minta tak tindak warga pengibar Bendera One Piece*. <https://video.tribunnews.com/view/856001/indonesia-kena-omel-amnesty-internasional-minta-tak-tindak-warga-pengibar-bendera-one-piece>